

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Kamis 9 Januari 2025
Wilayah	Kota Makassar



DPRD Desak Pemprov Tuntaskan DBH

DPRD Desak Pemprov Tuntaskan DBH

MAKASSAR, FAJAR—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera menyelesaikan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota. Pasalnya, dana tersebut dianggap vital untuk pembiayaan berbagai program di daerah.

Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Hamzah Hamid, mengaku bingung dengan sikap Pemprov terkait persoalan ini. Menurutnya, hingga saat ini Pemprov belum memberikan penjelasan terkait alasan keterlambatan pembayaran DBH tersebut.

"Kami juga belum memahami mengapa Pemprov Sulsel

belum mentransfer DBH secara keseluruhan ke daerah. Saya membaca beberapa berita, termasuk Kota Makassar, hingga saat ini DBH-nya belum cair," ujarnya.

Dalam waktu dekat Komisi C, kata dia, akan memanggil BPKAD Sulsel untuk dimintai keterangan terkait persoalan ini. Menurutnya, banyak

daerah yang mengeluhkan keterlambatan ini, salah satunya adalah Makassar.

"Oleh karena itu, kami berencana memanggil BPKAD untuk memberikan klarifikasi. Kami ingin mengetahui alasan keterlambatan transfer DBH ini. Padahal, berdasarkan evaluasi terakhir di Badan Anggaran (Banggar), paling lambat 31

Desember DBH seharusnya sudah ditransfer," tegasnya.

Anggota DPRD dari dapil Makassar B (Dapil II) itu mengaku, DBH merupakan salah satu item Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, beberapa daerah banyak yang menggantungkan program

:: Baca DPRD... Hlm 11

DPRD Desak Pemprov Tuntaskan DBH

⚡ Lanjutan Halaman... 9

melalui anggaran tersebut. Namun, kondisinya justru mandek tanpa keterangan.

"Makanya ada beberapa program di daerah yang butuh biaya tidak terlaksana, karena mereka berharap dari DBH itu. Mereka itu kan sudah catat DBH diproyeksikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kan kita kasihan juga ini kalau tidak dibayarkan," kata Ketua DPD PAN Kota Makassar itu.

Menurut dia, tidak ada jalan lain bagi Pemprov selain memberikan keterangan dan membayarkan DBH tersebut secara tuntas ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulsel. "Kami sudah bincangkan itu di Komisi C, kemudian ini dicarikan waktu dulu untuk mengundang BPKAD ke DPRD. Tetapi itu dalam waktu

dekat ini, tidak boleh juga berlama-lamalah," terangnya.

Anggota DPRD Sulsel dari Dapil 9, Muhtadin juga menegaskan, pihaknya sudah lama mendorong hal tersebut ke Pemprov. Tetapi, jawaban yang diberikan Pemprov nanti dibayarkan. Itu tidak terealisasi hingga hari ini.

"Saya sebenarnya kan tidak di Banggar, tetapi saya juga selalu mendorong itu supaya dicairkan. Cuma setiap kita meminta keterangan dari Pemprov, bahasanya selalu nanti dibayar tetapi tidak kunjung terlaksana," terang Mantan Ketua DPRD Pinrang itu.

Kondisi daerah yang ada di dapilnya juga sama dengan daerah lain. Mereka mengharapkan DBH segera dicairkan. Sebab, sejumlah item dan program yang sumber dananya tertera melalui

DBH.

"Pinrang sendiri ini kondisinya sama dengan daerah lain. Pasti ada hal yang terkendala akibat DBH yang tidak cair itu. Saya yang dari dari Dapil 9, termasuk Pinrang, berharap itu segera dibayarkan, apalagi itu tahun 2024 dan sekarang sudah 2025," harapnya.

Halsama juga dilontarkan Anggota Fraksi Golkar dari Dapil Makassar A, Kadir Halid. Dia meminta agar Pemprov tidak terlalu banyak alasan. Segera bayarkan DBH yang belum selesai. "Pemprov Sulsel harus sesegera mungkin menyelesaikan kewajibannya itu, dengan membayar DBH kepada seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulsel. Jangan ditunda-tunda lagi," tegasnya.

Hasil (DBH) perlu bersabar. DBH dibayarkan sesuai realisasi pajak. Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengungkapkan, Pemprov Sulsel akan membayarkan sisa salur DBH tahun lalu. Namun, menunggu ketersediaan anggaran pada APBD. "Prinsipnya kita tetap bayar. Tergantung keuangan yang masuk," ujar, Jufri, Rabu, 8 Januari.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry langsung memberikan atensi khusus kepada persoalan DBH tersebut pada hari pertama ia menginjakkan kaki di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu Siang, 8 Januari. Pemprov akan menyelesaikan tanggung jawabnya. "Nanti kita akan selesaikan secara bertahap tentunya. Karena itu kan terkait hak dan kewajiban memang," terangnya. (wid-uca/ham)